

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah umum yang sering terjadi pada negara berkembang yaitu kemiskinan penduduk. Cara yang dapat ditempuh adalah meningkatkan pendapatan perkapita penduduk melalui pemerataan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai kebijakan oleh suatu negara untuk meningkatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat, atau didefinisikan sebagai rangkaian cara yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam waktu lama. Masalah pendapatan dinilai sangat penting karena kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari kemampuan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>1</sup>

Pembangunan suatu wilayah seringkali disertai dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan permintaan lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara lapangan kerja formal yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang ada menyebabkan meningkatnya pengangguran yang mendorong masyarakat untuk bekerja di sektor informal karena dianggap lebih mudah untuk dilakukan.<sup>2</sup> Banyak orang tertarik sebab dibandingkan sektor formal, sektor ini tidak memerlukan keahlian tertentu dan pendidikan tinggi, dan pasar yang menjanjikan. Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan.<sup>3</sup>

Keberadaan sektor informal pada dasarnya merupakan fenomena yang sudah dikenal luas. Secara sederhana sektor ini adalah usaha yang tidak terdaftar pada instansi pemerintah.<sup>4</sup> Sektor ini juga dikenal sebagai perekonomian bayangan, karena semua aktivitasnya tidak termasuk dalam statistik resmi pemerintah. Oleh karena itu tidak tercakup dalam peraturan negara dan pajak.<sup>5</sup> Salah satu kegiatan sektor informal adalah perdagangan. Perdagangan

---

<sup>1</sup> Abdull Rahman Sulaeman, dkk, *Ekonomi Makro*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 73.

<sup>2</sup> Reynaldo Chryistian Aotama, Deavy Rosaliny Henny Klavert, "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon," *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 18, No. 1, (2021): 1.

<sup>3</sup> Retno Wijyantii, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota," *Jurnal Teknik* 30, No. 3, (2009): 169.

<sup>4</sup> Atira Jafra, *Perbedaan Sektor Formal dan Usaha Informal*, atirajafra.skincare, 18 April 2016, <https://atihayati69.wordpress.com/2016/04/08/perbedaan-sektor-usaha-formal-dan-usaha-informal/>.

<sup>5</sup> Alisjabhana, *Merginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Pers, 2006), 2.

merupakan konsep ekonomi dimana perkembangan perdagangan perlu melindungi kebutuhan konsumen, menambah pendapatan devisa, kesempatan kerja, pemerataan peluang berusaha sekaligus meningkatkan pendapatan produsen.<sup>6</sup>

Pelaku usaha pada sektor informal seperti petani yang memiliki tanah dan mengerjakan lahannya sendiri, pekerja, pedagang kecil, pedagang musiman, dan pedagang kaki lima. Sektor yang digemari masyarakat yaitu pedagang kaki lima. Mereka beralih menjadi pedagang kaki lima karena tidak mendapatkan pekerjaan pada sektor formal.<sup>7</sup> PKL menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan rakyat kecil yang tinggal di perkotaan terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Sektor informal seperti PKL dapat mengurangi pengangguran dan menjadi penyangga perekonomian.<sup>8</sup>

PKL dalam perkembangannya, tumbuh pesat di pusat-pusat kota. Setelah krisis ekonomi melanda, profesi sebagai PKL ini semakin diminati. Hal tersebut diperkuat dengan mudah ditemukan konsentrasi-konsentrasi PKL di pinggir jalan, disekitar pusat perbelanjaan, hingga menjarah ruang publik (*Public Space*), yang sebenarnya bukan tempat untuk berjualan. Mereka menjual bermacam-macam dagangan mulai dari makanan, minuman, mainan anak-anak, pakaian, sepatu, sandal, tas, barang-barang elektronik hingga jasa sewa mainan untuk bermain anak-anak.<sup>9</sup>

Selain itu, keberadaan PKL ini justru menjadikan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi retribusi dari kegiatan PKL ini bisa menjadi pemasukan bagi daerah dan di sisi lain permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL ini sering membuat PKL dipojokkan menjadi penyebab berbagai masalah yang ada. Sehingga memaksa pedagang untuk berurusan dengan petugas ketertaman dan ketertiban (Tramtib) atau Satpol PP setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Djiwandono J, Soedrajad, *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang, dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1992), 43.

<sup>7</sup> Robichiny D Dan Hamid, “*Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*,” (Jakarta: LP3ES, 1994), 57.

<sup>8</sup> 70% Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Disumbang Sektor Informal, Detik Finance, 05 Mei 2013, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2238328/70-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-disumbang-sektor-informal>.

<sup>9</sup> Muallim Krismartini, “Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Simpang Lima Kabupaten Pati,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5, No. 1, (2008): 36.

<sup>10</sup> Muallim Kismartini, “Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Simpang Lima Kabupaten Pati,” 36.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>11</sup> Sehingga diperlukan penataan yang lebih teratur. Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan upaya pemerintah daerah melalui menetapkan lokasi binaan, memindahkan, menertibkan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan mengindahkan kepentingan umum, etika, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan peraturan.<sup>12</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda itu sendiri mengatur tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pati. Perda tersebut mengatur mengenai penataan, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi. Tetapi dalam implementasi Perda tersebut belum baik, karena masih ada pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar, pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran tempat para pedagang kaki lima masih melanggar zona-zona yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lokasi pedagang kaki lima yang ada dalam Pasal 6 meliputi zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk aktivitas PKL dan jam berjualan para PKL. Meskipun jam berjualan para PKL sudah ditentukan, yaitu pukul 17.00 sore hingga 03.00 pagi. Tetapi masih terdapat PKL yang melanggar peraturan tersebut, dan Pelanggaran K3 (Ketertiban, keamanan, dan keindahan).<sup>13</sup>

Relokasi PKL dipandang sebagai upaya penataan dan pengelolaan PKL yang dapat menguntungkan semua pihak baik pedagang, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Relokasi adalah suatu usaha untuk memindahkan sesuatu dari suatu lokasi ke lokasi lain yang dianggap lebih baik. Relokasi tidak hanya memindahkan

---

<sup>11</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2012).

<sup>12</sup> Nur Fadhilah Aniq, Dra. Margaretha Suryaningsih, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1, <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id.

<sup>13</sup> Nur Fadhilah Aniq dan Dra. Margaretha Suryaningsih, Implementasi dalam Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati, 1-2.

tempat dari segi ruang geografis, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya. Selain itu, selama proses relokasi harus memperhatikan lokasi dan kualitas tempat relokasi baru karena mempengaruhi akses usaha, jaringan sosial, dan peluang pasar.<sup>14</sup>

Relokasi PKL dapat berdampak positif dan negatif. Dampak negatif dari relokasi dapat merugikan pedagang karena dapat terputus dengan konsumen karena perubahan lokasi berdagang dan ketidakstabilan usaha karena proses adaptasi dengan peraturan baru atau pesaing baru di lokasi yang sama. Selain itu, relokasi diharapkan dapat memperbaiki tata ruang kota, meningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan pedagang dan konsumen. Sehingga dapat mengembangkan usaha PKL serta meningkatkan kesejahteraan pedagang.<sup>15</sup>

Adanya Alun-Alun Kembang Joyo dinilai tepat bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi di tempat penimbunan kayu (TPK) Perhutani Pati. Alun-Alun Timur (Kembang Joyo), digunakan untuk menampung PKL dan diprioritaskan untuk PKL yang telah terdaftar di Disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) Kabupaten Pati. Menurut Disperindag Pati, PKL di Kabupaten Pati tidak semuanya bisa berjualan di Alun-Alun Kembang Joyo. Namun mereka mendahulukan para PKL yang direlokasi dari TPK Perhutani Puri. Sementara itu, saat ini terdapat 360 lapak yang tersedia dan semuanya telah terisi. Pada Oktober tahun 2020 lalu, sebanyak 360 lapak telah dilakukan verifikasi. Dalam penentuan jumlah lapak yang tersedia, mengacu pada data banyaknya pedagang di tahun 2020. Dengan dasar itu, menentukan jumlah lapak yang tersedia saat ini di Alun-Alun Kembang Joyo.<sup>16</sup>

Alun-Alun Timur atau Alun-Alun Kembangjoyo ini menjadi tempat PKL yang sebelumnya menempati zona merah. Yaitu yang dulunya berada di Simpang Lima Pati, Jalan Sutomo sampai perempatan Rogowangan, Jalan Wahidin, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, dan yang semula berada di Tunggul Wulung.<sup>17</sup> Pandangan

---

<sup>14</sup> Prasetya M A & Fauziah L, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4, No. 2, (2016): 135. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>.

<sup>15</sup> Purnomo R A, Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto, *Ekulilibrium*, 11, No.1, (2016): 3.

<sup>16</sup> Falaasifah, DPRD Pati Harap Alun-Alun Kembang Joyo Geliatkan Pedagang Kaki Lima, 9 Februari 2022, <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/dprd-pati-harap-alun-alun-kembang-joyo-geliatkan-pedagang-kaki-lima/>.

<sup>17</sup> Putra dan Revan Zaen, "Alun-Alun Kembangjoyo Pati Ditargetkan Bisa Ditempati Para PKL Bulan Ini, Wartaphoto.net, 11 Januari 2022,

masyarakat terhadap pedagang kaki lima ini adalah solusi terhadap kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di suatu kota. Sehingga usaha pedagang kaki lima (PKL) ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat.

Pendapatan pekerja informal tidak berupa upah bulanan seperti tenaga kerja formal. Upah tenaga kerja formal diintervensi pemerintah melalui ketentuan upah minimum provinsi (UMP). Pendapatan pekerja informal tidak terkait dengan campur tangan pemerintah.<sup>18</sup> Pendapatan atau merupakan total pendapatan yang diperoleh pengusaha setelah dikurangi biaya produksi.<sup>19</sup> Pendapatan berpengaruh besar terhadap perkembangan suatu usaha, semakin tinggi pendapatan yang didapatkan maka semakin tinggi juga usaha untuk memenuhi segala pengeluaran dan kegiatan.<sup>20</sup>

Lokasi usaha memerlukan peninjauan yang baik karena lokasi usaha merupakan salah satu cara dalam usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan usaha.<sup>21</sup> Berdasarkan teori lokasi pendekatan losch dijelaskan bahwa lokasi penjual berpengaruh besar terhadap jumlah konsumen. Semakin jauh dari lokasi penjual, semakin sedikit keinginan konsumen untuk membeli karena biaya transportasi ke lokasi penjual semakin mahal. Produsen harus memperhatikan lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang dapat memperoleh pendapatan besar. Dalam hal ini lokasi usaha merupakan salah satu faktor penting dalam pendapatan karena lokasi usaha yang strategis dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan usaha.<sup>22</sup>

Selain faktor lokasi, pendapatan pedagang kaki lima yang cenderung kecil/rendah sering dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu modal kerja yang relatif rendah dan jam

---

<https://wartaphoto.net/2022/01/11/alun-alun-kembangjoyo-pati-ditargetkan-bisa-ditempati-para-pkl-bulan-ini/>.

<sup>18</sup> Rohmatuli Isroha, "Pengaruh Modal Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan bersih Pedagang kaki Lima di Kelurahan Ngaliyan Semarang," (Semarang: UIN Walisongo, (2015), 8-9.

<sup>19</sup> Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Pembangunan*, (UI Press: Jakarta, 2000), 37.

<sup>20</sup> Budi Prihatminingtyas, "Pengaruh Modal, Lama Usaha, Jam Kerja dan Lokasi Usaha terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Landungsari," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi* 7, No.2, (2019): 149. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>.

<sup>21</sup> Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 122.

<sup>22</sup> Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, 145.

kerja yang dibatasi.<sup>23</sup> Modal menghasilkan barang baru atau merupakan alat untuk menghasilkan pendapatan, sehingga ada ketertarikan atau dorongan untuk mendapatkan modal (*capital formation*).<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pentingnya modal tersebut, modal didefinisikan sebagai uang yang tidak dibelanjakan akan tetapi disimpan kemudian diinvestasikan. Oleh karena itu, menambah modal yang digunakan maka dapat menambah pendapatan karena semakin tinggi modal menentukan penghasilan yang didapatkan, karena usaha yang dijalankan menjadi luas dengan modal yang besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal maka semakin meningkatkan jumlah produktivitas yang dapat meningkatkan penjualan.<sup>25</sup>

Modal dalam suatu usaha harus dapat memenuhi pengeluaran atau operasional usaha sehari-hari. Karena dengan adanya modal yang besar dan memadai maka dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha. Sehingga usaha yang dijalankan tidak mengalami kesulitan keuangan maupun berpengaruh besar bagi keberlangsungan usaha yaitu meminimalisasi terjadinya kebangkrutan usaha.<sup>26</sup>

Selain modal kerja, faktor jam kerja juga berpengaruh. Secara umum jam kerja didefinisikan sebagai waktu yang dicurahkan untuk bekerja. Selain itu, jam kerja merupakan jangka waktu yang dinyatakan dalam jam untuk bekerja. Dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jam kerja yang digunakan, semakin produktif pekerjaan yang dilakukan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Yustynus Nugroho dan Budiono Santoso, “*Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan Gejayan dan Jalan Malioboro*,” (Skripsi: Universitas Sanatal Darma Yogyakarta, (2001), 14.

<sup>24</sup> Mubyairto, *Peluang kerja dan Berusaha di Daerah Pedesaan*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), 107.

<sup>25</sup> Hidayat T, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta: Media Kita, 2010), 77.

<sup>26</sup> Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 122.

<sup>27</sup> Mantra I B, *Demografi Umum*, (Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 225.

**Tabel 1.1. Rata-Rata Jumlah Pembeli Per hari**

| No    | Jumlah pembeli | Sebelum relokasi |              | Sesudah relokasi |              |
|-------|----------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|       |                | Jumlah (orang)   | Persentase % | Jumlah (orang)   | Persentase % |
| 1.    | < 10 orang     | 2                | 7%           | 5                | 17%          |
| 2.    | 10 – 30 orang  | 8                | 27%          | 16               | 53%          |
| 3.    | 30 – 50 orang  | 13               | 43%          | 6                | 20%          |
| 4.    | > 50 orang     | 7                | 23%          | 3                | 10%          |
| Total |                | 30               | 100%         | 30               | 100%         |

Berdasarkan tabel di atas jumlah pembeli terbanyak sebelum relokasi yaitu 30 – 50 orang dengan persentase 43% dan jumlah pembeli paling sedikit yaitu kurang dari 10 orang sebesar 7%. Sedangkan setelah relokasi jumlah pembeli mengalami penurunan dengan jumlah pembeli terbanyak yaitu 10 – 30 orang sebesar 53% dan jumlah pembeli paling sedikit yaitu lebih dari 50 orang sebesar 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurunnya jumlah pembeli menyebabkan banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Alun-Alun Kembangjoyo saat ini, telah resmi ditempati oleh para pedagang kaki lima (PKL). Akan tetapi, mereka mengungkapkan bahwa banyak pedagang kaki lima yang direlokasi di Alun-Alun Kembangjoyo saat ini masih mengalami penurunan pendapatan. Lokasi berdagang yang terus menerus berpindah membuat banyak pembeli dan pelanggannya kebingungan dan belum mengetahui lokasi yang baru. Beberapa pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa di lokasi yang baru, mereka bertemu pembeli langganannya setelah beberapa bulan bahkan ada yang sampai satu tahun. Adanya kegiatan relokasi ini mempengaruhi aktifitas berdagang yang tidak sama seperti lokasi sebelumnya. Hal tersebut menjadikan suatu kendala bagi pedagang dalam beradaptasi dengan lokasi dan pelanggan yang baru.

Pedagang dalam mendapatkan lokasi lapak di Alun-Alun Kembangjoyo, mereka tidak dapat memilih tetapi ditentukan berdasarkan undian. Sehingga banyak pedagang yang mengeluhkan

mengenai lokasi lapak yang kurang strategis. Pedagang yang mendapatkan lokasi lapak di pinggiran jalan lebih terjangkau pembeli sedangkan pedagang yang mendapatkan lapak bagian belakang, letaknya jauh dari keramaian. Hal tersebut mempengaruhi sepinya pembeli. Beberapa pedagang juga kurang puas lantaran lapak yang ditempatinya hanya berukuran 3 x 3 meter. Sedangkan barang yang dijual cukup banyak dan membutuhkan ruang yang luas.<sup>28</sup>

Tidak hanya mengenai lapak, pedagang mengeluhkan sarana dan prasarana di Alun-Alun Kembangjoyo. Khususnya saluran pembuangan air dan sistem drainase yang buruk. Sistem drainase yang tidak lancar membuat genangan air muncul di banyak titik dan jalanan paving menjadi becek ketika hujan tiba. Hal tersebut kelihatan ringan tetapi tidak bisa dianggap sepele karena cukup mengurangi kenyamanan pedagang dan pengunjung yang datang. Beberapa kendala yang dihadapi PKL tersebut, terutama kurangnya perhatian pemerintah dalam proses peremajaan dan pengembangan lokasi saat ini yang merugikan pedagang.

Selain itu, pedagang yang berjualan di lokasi yang baru ini, mereka hanya mempunyai sedikit modal dan bahkan ada yang kekurangan modal. Lokasi PKL di Pusat Kuliner GOR Puri yang kurang strategis dan sepi pembeli menyebabkan kerugian dan berkurangnya modal secara terus menerus. Sehingga menyebabkan keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya. Masing-masing PKL juga menjual barang yang berbeda baik menjual makanan, pakaian, aksesoris dan wahana permainan anak-anak. Sehingga modal usaha yang dimiliki antar PKL juga berbeda baik yang menjual produk sejenis maupun berbeda jenis. Jam kerja di alun-alun kembangjoyo ini tidak dibatasi melainkan pedagang bebas berjualan kapan saja. Tetapi masing-masing pedagang mempunyai jam kerja yang berbeda. Beberapa pedagang ada yang buka sore sampai larut malam, tetapi ada juga yang baru buka ketika malam dan pulang lebih cepat. Hal tersebut mempengaruhi jumlah pembeli dan penghasilan yang mereka peroleh.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Relokasi, Jam Kerja, dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati”**.

---

<sup>28</sup> Darmo, wawancara oleh penulis, 27 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>29</sup> Arif, wawancara oleh penulis, 27 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah relokasi berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati?
2. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati?
3. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati?
4. Apakah relokasi, jam kerja, dan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati?

## C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati.
2. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati.
4. Untuk mengetahui pengaruh relokasi, jam kerja, dan modal usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menyediakan pengetahuan tambahan dalam bidang ekonomi, khususnya terkait pendapatan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kembangjoyo Pati yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya relokasi, jam kerja, dan modal usaha.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman bagi peneliti dan mampu

menerapkan teori yang telah didapatkan serta dapat mengimplementasikan dengan fakta di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki peran positif dalam memberikan informasi khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL) Alun-Alun Kembangjoyo Pati untuk meningkatkan pendapatan mereka.

**E. Sistematika Penulisan**

Kerangka penulisan dalam sistematika penulisan ini merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, halaman daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai deskripsi teori yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Meliputi pengertian relokasi, jam kerja, modal usaha, pendapatan, serta pedagang kaki lima (PKL). Kemudian membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yaitu tentang gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan

BAB V : Penutup

Bab ini berisi pemaparan dari kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi akhir skripsi berisikan daftar pustaka, olah data analisis statistik, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.